



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos       Babel Pos  
 Babel News       Radar Bangka  
 Rakyat Pos       Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											✓												

## Masih Banyak Potensi Pajak & Retribusi Daerah

### ► Untuk Pendapatan Asli Daerah

**TOBOALI** - Fraksi Gemindra Amanat Sejahtera (GAS) DPRD Bangka Selatan menilai anggaran perubahan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Basel mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yakni sebesar Rp 48 miliar lebih atau 6,21 persen dengan total pendapatan daerah diangka Rp 787 miliar lebih.

Sekretaris fraksi GAS, Samsir menjelaskan peningkatan pendapatan daerah tersebut disumbangkan oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 41 miliar lebih atau 49,92 persen lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 33 miliar lebih atau 31,13 persen. Sumbangan peningkatan besar pada PAD dari pajak daerah sebesar Rp 13 miliar lebih dan dari retribusi sebesar Rp 1,72 miliar.

"Kenaikan PAD yang sangat signifikan tersebut disebabkan adanya penetapan target realisasi PAD lebih kecil dibandingkan dengan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada. Karena sampai saat ini tidak ada penambahan wajib pajak dan wajib retribusi yang baru," kata Samsir.

Menurutnya, untuk belanja daerah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan total Rp 871 miliar lebih meliputi belanja tidak langsung (BTL) Rp 365 miliar lebih dan belanja langsung (BL) Rp 505 miliar lebih. Peningkatan terhadap belanja langsung (BL) sebesar Rp 123 miliar lebih atau 24,37 persen itu defisitnya ditutupi oleh sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2016 lalu sebesar Rp 83 miliar lebih.

Untuk itu, pihaknya menyarankan untuk mencapai kinerja APBD yang baik dalam hal realisasi anggaran tahun 2017, hendaknya Pemkab melalui Satuan Kerja (Satker) terkait dalam peningkatan pendapatan daerah, yaitu pajak dan retribusi daerah agar betul-betul memastikan dengan selalu menitikberatkan pada usaha pencapaian target pendapatan yang sudah disepakati mendekati 100 persen. Hal ini untuk memastikan semua program kegiatan dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran.

"Memetakan dan menstratifikasi semua kegiatan APBD

induk, maupun perubahan yang diprediksi tidak bisa terselesaikan sampai batas waktu akhir tahun anggaran tahun 2017, khususnya kegiatan atau program fisik yang nilai nominalnya diatas Rp 1 miliar agar diprogramkan pada anggaran tahun 2018," ujar Samsir.

Politisi PKS itu juga menambahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan tidak terselesaikannya sejumlah kegiatan fisik yang nilai nominalnya diatas Rp 1 miliar yang belum dilakukan proses lelang, agar betul-betul diestimasi dan diprediksi tentang kemungkinan terselesaikannya kegiatan tersebut dengan sisa waktu yang tersisa kurang lebih 3 bulan lagi dengan mempertimbangkan iklim cuaca dan pencapaian realisasi pendapatan daerah.

"Beberapa kegiatan di dinas PU (Pekerjaan Umum) yang bersumber dari dana alokasi khusus yang sesuai dengan Juklak dan Juknisnya harus terealisasi serapannya pertanggal 31 Agustus 2017 sebesar 75 persen agar tidak dilaksanakan daripada akan membebani APBD tahun selanjutnya, karena sesuai dengan Permenkeu bahwa sisa yang tidak terselesaikan tidak akan dianggarkan kembali oleh pemerintah pusat dan akan menjadi beban APBD pada tahun berikutnya (2018)," jelas Samsir, yang juga Sekretaris Komisi DPRD Basel.

Lebih lanjut pihaknya menambahkan, terkait dengan terbitnya peraturan menteri keuangan (Permenkeu) nomor 112/PmK.70/2017 tentang revisi dana alokasi umum (DAU) dan dana desa. Peraturan Menkeu itu diundangkan setelah ditetapkan nota kesepakatan KUA-PPAS Basel sebesar Rp 4.088.674.000,00 miliar.

Untuk itu, Samsir juga menyarankan agar Pemkab merasionalkan kembali belanja daerah dengan menunda sejumlah program yang berada di periodisasi terendah pada skala prioritas sebesar jumlah pengurangan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sesuai dengan Permenkeu tersebut.

"Untuk peningkatan infrastruktur transportasi agar Pemkab Basel memprioritaskan anggaran perbaikan dan peningkatan jalan penghubung antar kecamatan dari Payung sampai perbatasan Bangka Tengah yang sudah rusak berat," pungkasnya. (tom)